

TINJAUAN BUKU

RETORIKA PEMERINTAH DAN RESPONS MASYARAKAT
STUDI KASUS DI INDONESIA DAN FILIPINA

John Haba

Greg Acciaioli-Jenifer Nourse (eds). *Official Rhetoric-Popular Response: Dialogue and Resistance in Indonesia and the Philippines*.
Adelaide: Social Analysis-Journal of Cultural and Social Practice,
No. 35, April 1994. 164 halaman

I

Buku ini merupakan himpunan karangan dari para penulis (sekaligus peneliti), yang telah melakukan penelitian lapangan di Indonesia dan Filipina. Di Indonesia, para peneliti melakukan tugas penelitiannya di Indonesia bagian Timur. Daerah yang diteliti di Indonesia adalah: Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Flores - Nusa Tenggara Timur. Di Filipina penelitian dilaksanakan di antara kelompok masyarakat Iranun dan Batak.

Dua topik utama dari tulisan tentang Indonesia berasal dari Sulawesi Selatan. Secara umum tulisan para peneliti itu dapat diringkaskan sebagai berikut. Greg Acciaioli memusatkan perhatiannya pada: Program Intensifikasi Padi, di mana pemerintah setempat mendemonstrasikan kesanggupan mereka dalam mempergunakan terminologi lokal, untuk menyadarkan dan memberdayakan masyarakat untuk mendukung program Intensifikasi Pertanian. Retorika yang cocok dengan mempergunakan terminologi lokal, dan dipadukan dengan pola kerja masyarakat ternyata mampu meningkatkan dan mensukseskan keikutsertaan masyarakat dalam program "Operasi Khusus Peningkatan Produksi Pangan" di Sulawesi Selatan atau *Operasi Lappo Ase* (hal. 41-42). Selanjutnya Acciaioli (1994:42) mengatakan:

By creating a program title using a local idiom of traditional expectations rather than a technocratic jargon of projected results, the government planners sought to elicit the cooperation of local farmers to achieve the aims of this stage of the rice intensification effort in South Sulawesi.

Ia juga menilai bahwa kesuksesan itu disebabkan oleh kemampuan *local elites* dalam menerapkan ideologi baru/moderen, yang berasal dari agen-agen pembangunan setempat, agar mereka dapat melanjutkan tradisi pengawasan terhadap masyarakat di mana program intensifikasi pertanian itu diberlakukan. Ketepatan istilah/konsep lokal yang dipergunakan telah memungkinkan keterlibatan para petani desa dalam proyek Intensifikasi Pertanian Padi itu. Dengan demikian, temuan Acciaioli mendemonstrasikan bahwa sebenarnya para petani Bugis tidak menentang diperkenalkannya ide-ide baru dari luar, tetapi sebaliknya *local elites* dan para pengusaha juga turut memanipulasikan istilah-istilah setempat untuk tujuan-tujuan pembangunan, termasuk di dalamnya keuntungan pribadi mereka.

Masih di Sulawesi Selatan (Bone), tulisan Thomas Gibson menganalisa bagaimana sejumlah ketegangan terjadi di antara orang Bugis di daerah ini. Inti permasalahan adalah; apakah mereka harus secara konsisten dan kontinyu memegang erat tradisi mistik leluhur raja-raja Bugis, ataukah mereka harus meninggalkannya agar kehidupan mereka sesuai dengan kemajuan dan perubahan yang dikehendaki di dalam Islam.

Thomas Gibson berusaha memahami latar belakang/penyebab dari pemberontakan (*revolt/rebellion*) yang berakar pada tradisi sejarah daerah sekitar 300 tahun lalu, yang turut mengilhami pemberontakan dan revolusi di antara orang Makasar. Ia berhasil menemukan akar persoalannya; yang bermuara pada sumber-sumber ketegangan antara kelompok modernis Islam dan mereka yang masih kuat menganut tradisi lokal (tradisional versus modern). Gibson menganalisis bagaimana retorika dan ideologi yang berasal dari sumber luar komunitas, kemudian dipergunakan oleh pelaku tertentu sesuai dengan tujuan-tujuan mereka. Sebagai contoh, pada tahun 1950an, lanjut Gibson, para pemimpin pergerakan Darul Islam bersama dengan kelompok modernis yang anti feodalisme berjuang melawan pembentukan negara kesatuan

Indonesia. Bagaimanapun, aktivitas gerilyawan di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar mesti berhadapan dengan "*local religious practitioners*", karena masyarakat setempat menentang keterlibatan para pendukung Islam modernis. Pergerakan yang mencirikan aktivitas milenarian itu, oleh Gibson dihubungkan dengan Aman Towa (otak dari kelompok) yang mempertahankan "*pre-Islam spiritual patterns*", yang oleh pihak modernis Islam telah direncanakan untuk menghapus berbagai pengaruh yang tidak sejalan dengan prinsip Islam. Di kemudian hari, Kahar Muzakkar menaklukkan para pengikut Amma Towa. Dengan demikian, sejak 1980an kelompok modernis Islam mulai berperan sebagai bagian dari sebuah kekuatan, yang tidak selalu mentolerir kekeliruan yang berkaitan dengan sejarah masa lampau di daerah ini.

Penelope Graham mengkaji tentang dialog, reaksi dan oposisi di sebuah desa di Larantuka, Flores Timur, di antara pemuka Katolik dan tokoh-tokoh masyarakat yang agak berpikiran liberal mengenai penting tidaknya sebuah "*village ritual house*" untuk para arwah leluhur harus dibangun, sesudah dibongkar dan dihanguskan secara berturut-turut pada tahun 1970an dan 1980an. Terdapat dua versi dalam masyarakat terhadap masalah itu. Di satu pihak, para teolog Katolik dan kelompok nasionalis (sejalan dengan ideologi nasional), menentang rencana itu. Studi dari Graham menunjukkan bahwa terjadi disharmoni dan 'perpecahan' di kalangan masyarakat akibat dari rencana membangun kembali rumah arwah bagi para leluhur itu. Untuk memperoleh dukungan, pihak imam Katolik melaksanakan doa umat secara terbuka. Meskipun masing-masing pihak yang bertikai berusaha untuk menyukseskan rencananya, namun menurut Graham, setiap wakil dari dua kelompok yang bertikai diwajibkan untuk mencari solusi kasuistik lewat jalur musyawarah menuju sebuah konsensus.

Dengan mempergunakan berbagai retorika formal yang diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk dialog dan kemudian terciptanya konsensus, wakil-wakil dari pihak gereja dan masyarakat mampu untuk menentang apa yang mereka pandang sebagai "*external hegemony*" terhadap masalah di dalam komunitas mereka sendiri.

Masih di daratan Flores, (Nage), George Forth menganalisis tentang ideologi pemerintah dan reaksi masyarakat setempat. Forth menelusuri bagaimana ideologi moderen dari pemerintah Indonesia

dapat menyusup masuk kedalam pola hidup orang Nage, kendatipun orang Nage memiliki dan menghormati simbol-simbol leluhur mereka, sehingga mereka dapat menjadi bagian dari kelompok masyarakat Indonesia yang lebih maju. Forth menemukan alasannya bahwa: orang-orang Nage memanfaatkan pikiran dan makna kultural serta simbol-simbol budaya nasional ke dalam komunitas mereka, agar supaya mereka tidak terpisahkan dari sebuah komunitas nasional, sebagaimana yang diinginkan oleh para modernis. Forth juga menyimpulkan dalam penelitiannya, bahwa satu-satunya jalan bagi kelompok masyarakat Nage dalam berhadapan dengan agen-agen pemerintah adalah: menerima unsur-unsur baru dari luar dari pada menentangnya.

Untuk suksesnya proyek pembangunan pemerintah yang disebut Hariban di antara kelompok masyarakat Batak di Palawan, Filipina yang bermukim di daerah hutan pegunungan, maka para petugas proyek itu berusaha untuk mempergunakan unsur-unsur budaya setempat (*the local cultural forms*), dan mengharapkan dan mendorong kelompok masyarakat Batak untuk berpartisipasi dalam program pembangunan tersebut. James Elder, peneliti di antara kelompok masyarakat Batak di Palawan menganalisis cara bagaimana usaha-usaha dari para agen pembangunan yang berasal dari luar komunitas etnik Batak, lewat proyeknya itu - sesungguhnya telah merusak tradisi budaya lokal. Kendatipun sekelompok masyarakat Batak Palawan menyadari bahwa kebudayaan mereka sementara menjalani proses transformasi, akan tetapi mereka sendiri ingin untuk mengadaptasi nilai-nilai baru dari luar - agar supaya mereka dapat sama dengan orang-orang Filipina yang bermukim di daerah dataran rendah. Dengan demikian, kelompok masyarakat Palawan dapat menerima *non-local cultural patterns*, walaupun di dalam cetak biru proyek pembangunan tersebut, mereka - oleh pemerintah setempat - dikategorisasikan sebagai "*the most primitive people in the region who are need of modernization*". Tercermin dalam retorika ini bahasa kekuasaan yang membuat relasi penguasa dan masyarakat menjadi renggang.

Thomas M McKenna mempertanyakan konsep James Scott (1976) dan Comarot (1985) yang menawarkan sebuah pemahaman tentang "*resistance*". Menurut McKenna, model definisi demikian termasuk di dalamnya setiap tindakan, sehingga apakah setiap orang yang terlibat dalam sebuah aksi juga mendefinisikannya sebagai resistensi atau tidak.

Selanjutnya McKenna menjelaskan bahwa interpretasi "berlebihan" mengenai terjadinya sebuah "*resistance*" (juga konsep hegemoni), mengingatkan pembaca terhadap sarjana-sarjana Barat yang sering mengaburkan (*distract*) kita, untuk memberikan perhatian secara berlebihan baik terhadap kasus-kasus yang sesungguhnya ditimbulkan oleh kekerasan akibat pemberontakan militer atau bukan. Selanjutnya McKenna menguraikan pendapatnya bahwa: bagaimanapun perlawanan kelompok Muslim Iranum terhadap pemerintah Filipina tidak hanya dipahami sebagai konflik di antara pemerintah setempat dan agen-agen negara yang lebih kuat. Tetapi, ia menggarisbawahi dari konflik kelompok Muslim Iranum dan pemerintah Filipina bahwa model "*top-down analysis*" gaya Scott (1985, 1986) dan Scott dan Kerkvliet (1986) memiliki kelemahannya. Argumentasi McKenna, Scott dan Kerkvliet telah melupakan faktor hubungan politik dan ekonomi, yang turut mengkondisikan karakteristik dari gerakan-gerakan perlawanan kelompok minoritas atau periferial. Ia juga yakin bahwa agen-agen setempat yang juga turut "dibesarkan" dalam kepentingan-kepentingan ekonomi di wilayah konflik, bersamaan dengan itu turut membentuk kantong-kantong perlawanan politik setempat. Dengan demikian, McKenna berpendapat bahwa resistensi berkelanjutan memperoleh 'haknya' untuk terus bertumbuh, dan dapat eksis dalam konteks masyarakat di mana sebuah negara memperoleh kemenangan terhadap resistensi yang ada. Negara tersebut dapat menjadi sasaran atau bertindak mengatasnamakan kepentingan-kepentingan setempat, apakah negara di mana perlawanan itu terjadi kuat atau tidak berdaya sama sekali.

Dari analisis para peneliti Barat di Indonesia dan Filipina mengenai berbagai aspek sosial, budaya, agama dan politik, secara umum (berdasarkan ringkasan) di atas - terlihat bahwa *resistance* (perlawanan) yang terjadi disebabkan oleh suatu reaksi spontan yang tidak selalu terorganisir, tidak sistematis dan tidak bertahan lama dalam kurun waktu tertentu. Perlawanan itu misalnya terlihat dari peristiwa Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan, yang melibatkan sejumlah kelompok di dalam masyarakat Sulawesi Selatan sendiri (regional), dan juga mengakibatkan intervensi pihak pusat (nasional) terhadap masalah Kahar Muzakkar itu. Apabila konsep James Scott (1985, 1986) dan James Scott serta Kerkvliet (1986) dipergunakan

secara konsisten, sebagaimana makna resistensi sebenarnya, maka terminologi resistensi dalam buku ini tidak selalu tepat dengan realitas dan konteks sejarah lokal di mana peristiwa-peristiwa diatas terjadi. Alasannya, apakah para aktor di balik semua peristiwa itu juga memiliki persepsi yang sama dengan para peneliti (termasuk Jim Scott); bahwa tindakan mereka dalam skala yang kecil, terhadap suatu kondisi yang represif dapat dikategorikan sebagai *resistance*. Ataukah fenomena-fenomena dan catatan-catatan historis masa lampau dari lokasi kejadian 'pergerakan', di mana para peneliti merekam kejadian-kejadian itu, oleh para peneliti diberi muatan 'politis' dan didramatisir sebagai sebuah pemberontakan, dari kelompok masyarakat tak berdaya terhadap kelompok penguasa. Dari sudut pandang lain, apakah benar - dilihat dari takaran peristiwa yang lokal sifatnya - dikemudian hari, oleh para peneliti kemudian diberi bingkai yang berbau politis (apalagi kalau dinilai dari kaca mata Barat), para peneliti akan menilainya sebagai sesuatu yang mengancam pranata, keharmonisan dan relasi antar kelompok masyarakat), sehingga setiap bentuk ungkapan dalam bentuk yang berbeda dilihat sebagai suatu resistensi.

Pertanyaan lain adalah: pengaplikasian gagasan Scott yang dipengaruhi oleh paham Leninistis tentang asumsi *burgouies*, sebagai sebuah aksi yang bermuatan politis (Scott 1986). Pandangan serupa turut memperkuat paham para penganut teori resistensi Scott untuk mengklasifikasikan bahwa: segala bentuk ketidakserasian di dalam sebuah komunitas terkecilpun, telah dianggap sebagai *social and political threat/deviation*. Oleh sebab itu, diperlukan pemisahan antara tindakan resistensi dan bukan resistensi dalam istilah *prepolitical*, dari rejim yang berkuasa terhadap kelompok atau pribadi yang secara politis tidak sealfiran dengan mereka. Dasar pembedaan itu dibentangkan berdasarkan konsekwensi dan maksud atau tujuan dari sebuah aksi. Menggabungkan antara dua aspek ini, maka pembaca bisa dengan saksama membedahkan antara *real resistance* yang sifatnya: a) terencana, sistematis dan saling berkaitan. b) Memiliki dasar dan arah yang jelas, c) terdapat akibat-akibat revolusioner, dan d) mempunyai konsep dan tujuan yang secara negatif akan mempengaruhi dasar kekuasaan yang ada.

Sebaliknya, yang tidak dikategorikan dalam konsep resistensi dapat dicirikan sebagai berikut. a) Tidak terorganisir, tidak sistematis

dan bersifat individualistik, b) mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok, c) tidak mempunyai dampak revolusioner, dan d) tidak memiliki makna dan tujuan langsung serta cenderung mengakomodasikan diri dengan sistem dari penguasa yang ada. Perbedaan ini penting untuk analisis dasar dari data yang para penulis kaji, sehingga dapat dibedakan dengan jelas peristiwa-peristiwa mana yang tepat dikategorikan sebagai resistensi dan tindakan mana yang tidak tepat disebut sebagai resistensi. Perbedaan-perbedaan itu akan lebih menarik jika terdapat penjelasan lanjutan dengan sifat dari pemberontakan (=penolakan) dan fakta yang sah mengenai korelasi di antara peristiwa-peristiwa itu.

Mengingat akan pengertian dasar dari kata resistensi, *to resist* yang berarti "*to exert oneself so as to withstand or counteract the force or effect of*". Dengan demikian, pertanyaan yang perlu dikedepankan adalah: dapatkah perbuatan-perbuatan individu seperti: mencuri, tidak sepaham dengan penguasa lokal atau membunuh beberapa ternak, sudah bisa diklasifikasikan sebagai resistensi, walaupun para pelaku itu sesungguhnya tidak terlibat dalam sebuah perbuatan makar secara terbuka, dan juga tidak menentang struktur dasar dari pada sistem kekuasaan yang eksis.

Buku ini menyajikan berbagai teknik untuk menghindari konflik terbuka dari kelompok masyarakat/pribadi dengan pemerintah, melalui dialog atau adaptasi terhadap nilai dan unsur baru dari luar komunitasnya (kasus masyarakat Nage di Flores). Sebuah cara menghindari konflik, atau untuk menjauhkan diri dari kemungkinan terhemasnya mereka untuk seterusnya menjadi kelompok periferial (kasus masyarakat Batak Palawan di Filipina). Kumpulan tulisan yang kaya akan data lapangan ini menyajikan: bagaimana respons dari pribadi dan kelompok masyarakat, terhadap kelompok atau penguasa yang tidak selalu sepaham dengan ideologi, konsep budaya, keagamaan dan cita-cita mereka. Di dalam pertemuan dengan berbagai unsur dan ide, pemerintah (penguasa), yang dalam istilah Jim Scott disebut "*superstructure class*" selalu berada pada pihak yang menang. Sebaliknya, pribadi dan kelompok kecil masyarakat yang menuntut haknya, diperhadapkan dengan pilihan: menerima nilai-nilai dan kebijakan dari luar komunitasnya, atau akan muncul selaku pihak yang tersisih. 'Kehandalan' pemerintah di Indonesia dan Filipina (juga di

sebagian besar Negara Dunia Ketiga) dengan alasan pembangunan dan kemajuan, telah sanggup untuk mempergunakan elemen-elemen budaya lokal untuk mensukseskan rencananya (kasus Sulawesi Selatan). Lebih dari pada itu, pemerintah juga mampu meredam berbagai gejolak yang ingin menentang hasrat hegemoninya terhadap pihak yang tidak berdaya. Kumpulan tulisan dalam buku ini juga menyajikan berbagai peristiwa mengenai: reaksi masyarakat pedesaan di Indonesia dan Filipina terhadap rencana pemerintah untuk mengontrol mereka, dengan memasukan mereka ke dalam proyek-proyek pembangunan yang sementara dikerjakan.

Akhirnya, kumpulan karangan dalam buku ini akan menjadi lebih lengkap apabila para penulis bisa melengkapinya dengan peta, di mana peristiwa yang mereka jelaskan itu terjadi. Dari segi redaksional, terdapat kesalahan cetak, seperti: "qualties" yang sebenarnya qualities (hal. 5), dan "lin" yang semestinya In (hal. 143), dan konsistensi dalam menerjemahkan pengertian LIPI, yang dalam bahasa Inggris lazimnya diterjemahkan sebagai: the Indonesian Institute of Sciences. Pada halaman 117, LIPI diterjemahkan dengan istilah "the Indonesian Department of Research". Kendatipun terdapat sedikit kesalahan redaksional, buku ini tetap kaya dengan rekaman-rekaman peristiwa historis dari khasanah budaya politik di Indonesia dan Filipina.